

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

5.1 Tugas Pembantuan yang Diterima

5.1.1 Dasar Hukum

Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Tugas Pembantuan (TP) adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Selanjutnya dalam ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dana tugas pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan TP.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, bahwa dana TP merupakan dana APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan TP. Dana TP Provinsi adalah dana yang berasal dari APBD Provinsi yang dilaksanakan oleh kabupaten, atau kota dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten, atau Kota, dan/atau Desa.

5.1.2 Dana dan Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Dana Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jambi melalui SKPD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp242.517.826.000,00 yang berasal

dari Kementerian Pertanian sebesar Rp147.957.000.000,00, Kementerian Perdagangan sebesar Rp8.000.000.000,00, Kementerian Kesehatan sebesar Rp43.500.000.000,00, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp4.464.187.000,00, Kementerian Sosial sebesar Rp4.126.757.000,00, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp4.034.635.000,00, Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp37.940.247.000,00, Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah sebesar Rp4.000.000.000,00. Secara keseluruhan realisasi penggunaan dana TP TA. 2013 yang dikelola SKPD/SATKER Provinsi Jambi adalah sebesar Rp217.602.038.672,00 atau 89,73%.

Tabel 5.1 Dana TP Yang Dikelola SKPD Provinsi Jambi TA. 2013

No	SKPD/ Satker	K/L Pemberi Dana TP	Total Dana (RP.000)	Realisasi (Rp.000)	(%)
1.	Dinas Pertanian TP	Kementan	69.246.109	68.330.594,25	99
2	Badan Ketahanan Pangan	Kementan	275.000	274.174	99,7
3	Dinas Perkebunan	Kementan	39.744.238	38.512.354,275	96,9
4	Dinas Peternakan dan Keswan	Kementan	30.691.653	21.310.125,538	69,43
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kemen Perdagangan	8.000.000	7.658.400	95,73
6	Balai Labkes	Kemen Kesehatan	13.500.000	27.870	0.21
7	RSUD RD Mattahter	Kemen kesehatan	30.000.000	28.181.319,1	93,94
8	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.464.187	3.874.879,391	86,80
		Kemensos	4.126.757	4.026.176,85	97,56
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	4.034.635	3.711.832,05	91,99
10	Dinas PU	Kementerian PU	37.940.247	37.934.555,96	99,98
11	Dinas Koperasi & UMKM	Kementerian Koperasi dan UKM	4.000.000	3.760.800	94,02
J U M L A H			242.517.826	217.602.038,672	89,73

Sumber: Bappeda Provinsi Jambi, 2014 (data diolah)

5.1.3 Satuan Kerja Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jambi yang melaksanakan TP adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans), Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Balai Laboratorium Kesehatan.

5.1.4 Program Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya

A. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

1. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi pada tahun 2013 mendapat dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Perdagangan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Disperindag Provinsi Jambi yang dibiayai melalui dana Tugas Pembantuan (TP) hanya terdiri dari 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan. Adapun program dan kegiatan dimaksud adalah **Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri**. Indikator Kinerja Utama (IKU) Program yaitu Meningkatnya efektifitas kebijakan yang menunjang pengembangan perdagangan dalam negeri. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri ini terdiri hanya 1 (satu) kegiatan pokok yang dilaksanakan yaitu Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan. Indikator Kinerja Kegiatan yaitu : Jumlah Pasar

Percontohan yang dibangun (unit) dan Keluaran (output) :
Pasar Tradisional.

Adapun realisasi dan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2 Realisasi Pelaksanaan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan

N o	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatkan Perdagangan Dalam Negeri	<u>Program</u>	Pembangunan Pasar Tradisional	5 pasar	5 pasar	100
		Perdagangan Dalam Negeri	Administrasi Kegiatan	3 bulan	3 bulan	100
		<u>Kegiatan</u> Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan				

Tolok Ukur Kinerja (Outcome) sebagai berikut :

1. Pembangunan Pasar Tradisional

Pembangunan pasar tradisional yang dibiayai melalui dana Tugas Pembantuan TA. 2013 berlokasi di 5 (lima) Kabupaten antara lain:

- a. Pasar tradisional Talang Bukit Kab. Muaro Jambi
- b. Pasar Tradisional Rantau Rasau Kab. Tanjab timur
- c. Pasar Mandiangin Kab. Sarolangun
- d. Pasar Baru Kab. Merangin
- e. Pasar Desa Batin Kab. Batanghari

2. Administrasi Kegiatan

Merupakan fasilitas pendukung dalam rangka monitoring dan konsultasi pelaksanaan kegiatan. Target keluarannya adalah terlaksananya semua kegiatan dengan baik, lancar dan mencapai target pada setiap tolok ukur yang terdiri dari :

- a. Honor operasional satuan kerja
- b. Belanja bahan
- c. Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota

2. Sumber dan Jumlah Anggaran

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut diatas, maka Pemerintah Pusat (Kementerian Perdagangan RI) telah mengalokasikan Dana Pembantuan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp7.658.400.000,00 atau 95,73 %.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- a. Dikarenakan dana pembangunan pasar tradisional baru cair pada bulan Oktober 2013, maka jangka waktu pembangunan pasar tersebut menjadi kurang maksimal.
- b. Masih kurangnya ketersediaan sarana perdagangan berupa pasar yang layak dan representatif di Provinsi Jambi.
- b. Keterbatasan anggaran APBD dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan pasar tradisional.

Solusi

- a. Pemerintah Pusat agar lebih mengkaji lagi agar semua kegiatan Tugas Pembantuan yang bersifat fisik yang membutuhkan

waktu pelaksanaan yang panjang agar tidak dilaksanakan di Triwulan IV pada TA yang bersangkutan.

- b. Mengupayakan penyediaan sarana perdagangan yang layak melalui pembangunan pasar pusat UKM.
- c. Melakukan upaya pencarian sumber-sumber pembiayaan pembangunan sarana distribusi dan perdagangan melalui anggaran Pemerintah Pusat.

B. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jambi

1. Program dan Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya

Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jambi mendapat bantuan dana Tugas Pembantuan TA.2013 untuk program Pembinaan Upaya Kesehatan dengan kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB dengan dana sebesar Rp13.500.000.000,00, realisasi sebesar Rp27.870.000,00 atau 0,21%.

2. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber Dana TP di BAPELKES berasal dari Kementerian Kesehatan Ditjen Bina Upaya Kesehatan dengan dana sebesar Rp13.500.000.000,00, realisasi sebesar Rp27.870.000,00 atau 0,21%.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. PPK menolak penandatanganan SPPBJ dan Kontrak tanggal 12 Desember 2013 dengan alasan sebagai berikut:

- a. Dari analisa dan pengamatan penyedia barang mempunyai realisasi barang paling cepat dalam waktu satu bulan penawaran.
 - b. Berdasarkan konsultasi dengan ahli pengadaan barang dan jasa dari Pusat Kajian dan Study Kebijakan Publik Jambi, bahwa sebenarnya batas akhir tersedianya barang secara lengkap dan riil adalah pada batas penarikan terakhir uang dari KPPN (23 Desember 2013) karena akan dibayarkan ke penyedia barang.
 - c. Berdasarkan pertimbangan point a dan b di atas diambil kesimpulan bahwa waktu yang tersisa yaitu kurang dari satu bulan (26 hari) sedangkan realisasi barang paling cepat satu bulan, maka jelas tidak memungkinkan untuk penyedia barang tersebut.
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak bersedia melanjutkan pengadaan alat kesehatan laboratorium kesehatan karena keterbatasan waktu ($\pm$ 10 hari) untuk penyelesaian sesuai dengan rencana kontrak pengadaannya.

Solusi

Diharapkan dana TP 2013 dapat dijadikan dana TP TA. 2014.

C. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi

1. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya

Penggunaan dana Tugas Pembantuan (TP) dari APBN Tahun 2013 oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi dilaksanakan untuk empat program yaitu:

1). Program pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

- a) Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat terpencil (KAT) dengan dana sebesar Rp2.765.533.000,00 yang digunakan untuk membangun rumah bagi KAT sebanyak 61 unit, pemberian bantuan jaminan hidup kepada 150 KK KAT, pemberian bantuan peralatan kerja, peralatan rumah tangga, bibit tanaman keras dan sertifikasi lahan kepada 61 KK KAT, pembangunan infrastruktur di lingkungan warga KAT sebanyak 3 unit serta pembuatan laporan keuangan/kinerja/monitoring/evaluasi/publikasi/sosialisasi serta kegiatan pendukung pelaksanaan pemberdayaan KAT. Adapun realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp2.669.076.850,00 atau 96,51%.

2). Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- a) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dengan dana sebesar Rp1.361.224.000,00 yang digunakan untuk membantu korban bencana alam, membimbing dan melakukan pendampingan sosial serta kampung siaga bencana. Melalui kegiatan ini, pada tahun 2013 telah dibantu 4.761 orang korban bencana alam yang tersebar di kabupaten/ kota lingkup Provinsi Jambi. Adapun realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp1.357.100.000,00 atau 99,70%.

3). Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Dana yang dialokasikan untuk program ini adalah sebesar Rp2.090.989.000,00 dengan lima kegiatan yaitu :

- a) Kegiatan fasilitasi penempatan transmigrasi dengan anggaran sebesar Rp408.605.000,00 yang digunakan untuk memfasilitasi perpindahan penduduk/ keluarga ke kawasan transmigrasi di wilayah strategis. Keluarga yang telah difasilitasi perpindahannya melalui kegiatan ini adalah sebanyak 100 kk.
- b) Kegiatan pembangunan permukiman dan infrastruktur kawasan transmigrasi dengan anggaran sebesar Rp105.400.000,00 yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi. Melalui kegiatan ini telah dibangun sarana sebanyak 4 unit.
- c) Kegiatan penyediaan tanah transmigrasi dengan anggaran sebesar Rp1.183.184.000,00 yang digunakan untuk penyediaan lahan kawasan transmigrasi di kawasan strategis. Melalui kegiatan ini telah tersedia lahan seluas 6.000 Ha di kawasan strategis.
- d) Kegiatan partisipasi masyarakat dengan anggaran sebesar Rp103.720.000,00 yang digunakan untuk pelibatan lembaga pemerintah dalam pembangunan kawasan transmigrasi di daerah tertinggal/ perbatasan.

- e) Kegiatan dukungan teknis dan manajemen dengan anggaran sebesar Rp290.000.000,00 yang digunakan untuk pelayanan teknis dan administrasi satker.

Adapun Realisasi anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 1.975.046.000,00 atau 94,46 %.

2. Sumber dan Jumlah Anggaran

Jumlah anggaran dana TP yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi TA. 2013 sebesar Rp 6.217.746.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp6.001.222.850,00 atau 96,52%.

3. Permasalahan dan Solusi

Hampir seluruh Instansi mempunyai program pro rakyat (untuk kesejahteraan masyarakat), terutama belanja Bantuan Sosial dengan sasaran dan tujuan yang berbeda-beda. Untuk itu perlu adanya sinergitas program dan anggaran baik antara Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun antar Dinas terkait tingkat Provinsi dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Secara umum pelaksanaan program-program di atas tidak ada permasalahan.

D. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi

1. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya

Penggunaan dana Tugas Pembantuan (TP) dari APBN Tahun 2013 oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi dilaksanakan untuk tiga program yaitu:

- 1). Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan

Pagu anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp2.877.109.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.827.109.000,00 atau 98,27% untuk tiga kegiatan yaitu:

- a.** Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia dengan hasil sebagai berikut:

- Sekolah lapangan pengelolaan tanaman terpadu (SLPT) komoditas serealia sebanyak 4.000 Ha
- Laporan pengelolaan produksi serealia sebanyak delapan laporan

- b.** Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan, dengan hasil sebagai berikut:

- Pemberdayaan 17 unit penangkar benih tanaman pangan
- Laporan kegiatan perbenihan sebanyak 3 laporan
- Pengadaan kendaraan bermotor sebanyak 2 unit

c. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya Ditjen Tanaman Pangan, dengan hasil yang telah dicapai yaitu:

- Rancangan program, kegiatan dan rencana kerja tanaman pangan sebanyak satu rancangan.
- Administrasi pelaksanaan kegiatan manajemen tanaman pangan selama 12 bulan.
- Laporan pelaksanaan manajemen tanaman pangan

2). Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.

Program ini mendapat pagu anggaran sebesar Rp64.039.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp63.265.590.400,00 atau 98,79% dan digunakan untuk pelaksanaan tiga kegiatan yaitu:

a. Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian, dengan hasil yang telah dicapai yaitu:

- Pengembangan jaringan irigasi dengan luas 19.398 Ha.
- Pemberdayaan kelembagaan sebanyak 18 unit/

b. Kegiatan perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian, dengan hasil yang telah dicapai yaitu:

- Pengembangan optimasi lahan seluas 2.740 Ha.

- Pengembangan SRI (sistem of Rice Intensification) pada luasan 300 Ha
 - Pengembangan jalan pertanian sepanjang 2 km
 - Pra/ pasca sertifikasi lahan pertanian sebanyak 5 paket
 - Perluasan sawah seluas 3.500 Ha
 - Perluasan areal hortikultura/ perkebunan/ peternakan seluas 60 Ha
- c. Kegiatan Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan output Layanan perkantoran selama 12 bulan layanan
- d. Kegiatan Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), dengan output 1 paket operasional PUAP.
- 3). Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor

Pagu anggaran untuk pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp2.330.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.268.680.700,00 atau 97.37% untuk 2 kegiatan yaitu:

- a.** Kegiatan Pengembangan Pemasaran Domestik dengan hasil yang telah dicapai adalah optimalisasi sarana dan kelembagaan pasar domestik sebanyak 5 unit.

b. Kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian dengan hasil yang telah dicapai adalah:

- 2 unit usaha pengolahan hasil tanaman pangan
- 1 unit usaha pengolahan hasil hortikultura
- Laporan kegiatan dan pembinaan sebanyak 3 laporan

2. Sumber dan Jumlah Anggaran

Jumlah anggaran dana TP yang dialokasikan untuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi TA. 2013 adalah sebesar Rp. 69.246.109.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.68.361.677.400,00 atau 98,72%.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Masalah

Pada kegiatan perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian terjadi relokasi dari Kabupaten batanghari seluas 200 Ha dan kabupaten Tanjung Jabung Barat seluas 118 Ha ke Kabupaten Kerinci.

b. Solusi

Melaksanakan survey pada tahun sebelum pelaksanaan kegiatan agar tidak ada perubahan lokasi.

E. Dinas Perkebunan Provinsi Jambi

1. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya

Penggunaan dana Tugas Pembantuan (TP) dari APBN Tahun 2013 oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dilaksanakan untuk tiga program yaitu:

- 1) Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan berkelanjutan dengan dana sebesar Rp32.546.288.000,00 yang dalam pelaksanaannya dipergunakan untuk:
 - a. Kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar
 - b. Kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim
 - c. Kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan
 - d. Kegiatan pengembangan penanganan pasca panen komoditas perkebunan
 - e. Kegiatan dukungan perlindungan perkebunan
 - f. Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Perkebunan
- 2) Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Eksport Hasil Pertanian dengan dana sebesar Rp4.509.500.000,00 dalam pelaksanaannya dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan:
 - a. Pengembangan mutu dan standarisasi
 - b. Pengembangan pemasaran domestik
 - c. Pengembangan pengolahan hasil pertanian

3) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan dana sebesar Rp3.049.000.000,00 dan dalam pelaksanaannya dipergunakan untuk kegiatan:

- a. Pengelolaan air irigasi untuk pertanian
- b. Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian
- c. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

2. Sumber dan Jumlah Anggaran

Jumlah anggaran dana TP yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk Dinas Perkebunan Provinsi Jambi TA. 2013 adalah sebesar Rp.39.744.238.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.38.512.354.275,00 atau 96,9%.

F. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi

1. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya

Penggunaan dana Tugas Pembantuan (TP) dari APBN Tahun 2013 oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi dilaksanakan untuk Program:

- 1) Pencapaian swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal dengan dana sebesar Rp23.681.653.000,00, realisasi Rp14.946.438.000,00 atau 63,11% dalam pelaksanaannya diperuntukkan untuk kegiatan:

- Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumberdaya lokal
 - Peningkatan produksi pakan ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal.
 - Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis.
 - Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal.
 - Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan.
- 2) Peningkatan nilai tambah, daya saing, industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil pertanian dengan dana sebesar Rp3.880.000.000,00, dalam pelaksanaannya diperuntukkan untuk kegiatan:
- pengembangan pemasaran domestik
 - pengembangan hasil pertanian.
- 3) Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana peternakan dengan dana sebesar Rp725.000.000,00, realisasi Rp690.659.167,00 atau 95,26%.

2) Sumber dan Jumlah Anggaran

Jumlah anggaran dana TP yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi TA. 2013 sebesar Rp30.691.653.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 21.310.125.538,00 atau 69,43%.

G. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

1. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya

Penggunaan dana Tugas Pembantuan (TP) dari APBN Tahun 2013 oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dilaksanakan untuk program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan kegiatan pengembangan panganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar. Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp275.000.000,00.

2. Sumber dan Jumlah Anggaran

Jumlah anggaran dana TP yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi TA. 2013 sebesar Rp275.000.000,00 dan telah terealisasi Rp274.175.000,00 atau sebesar 99,70%.

H. Dinas PU

1. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya

Penggunaan dana Tugas Pembantuan (TP) dari APBN Tahun 2013 oleh Dinas PU Provinsi Jambi dilaksanakan untuk dua Program yaitu:

a. Program Penyelenggaraan jalan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional

dengan anggaran sebesar Rp33.871.987.000,00. Anggaran tersebut telah terealisasi 100% baik fisik maupun keuangannya melalui sub kegiatan pemeliharaan rutin jalan fungsional sepanjang 81,15 km, pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan efektif sepanjang kembangan 24,30 km, e-monitoring, dan pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran.

b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Total anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp.4.068.260.000,00 dan secara fisik telah terealisasi sebesar 99,97% dengan realisasi keuangan sebesar 99,97%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dengan anggaran sebesar Rp.1.625.600.000,00 dan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa dengan anggaran sebesar Rp.2.442.660.000,00.

Melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan (OP) jaringan irigasi telah dilaksanakan:

- operasi dan pemeliharaan rutin terhadap 8.128 Ha jaringan irigasi pada Daerah Irigasi (DI) Siulak Deras dan DI Batang Sangkir
- pemeliharaan berkala terhadap 2.880 Ha jaringan irigasi pada Daerah Irigasi (DI) Siulak Deras dan DI Batang Sangkir.

Sedangkan kegiatan OP jaringan irigasi rawa yang dilakukan menghasilkan:

- Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) untuk kegiatan OP jaringan irigasi rawa seluas 11.103 Ha pada Daerah Rawa Irgan Hulu dan Daerah Rawa Simpang Pandan
- Terselenggaranya OP rutin terhadap Daerah Rawa Irgan hulu dan Daerah Rawa Simpang Pandan seluas 11.103 Ha.
- Terselenggaranya OP berkala terhadap Daerah Rawa Irgan Hulu seluas 800 Ha.

2. Sumber dan Jumlah Anggaran

Jumlah anggaran dana TP yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi TA. 2013 sebesar Rp. 37.940.247.000,00 dengan realisasi fisik dan keuangan sebesar 99,98%.

I. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi

1. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi pada Tahun 2013 mendapat Tugas Pembantuan (TP) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk program :

- 1) Pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap dengan dana sebesar Rp404.990.000,00, realisasi sebesar Rp381.861.000,00 atau 94,29% dalam bentuk kegiatan:

- Pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawasan kapal perikanan dengan alokasi dana sebesar Rp204.990.000,00, realisasi Rp182.061.000,00 atau 86,03%.
- Pengelolaan sumberdaya ikan (SDI) dengan alokasi dana sebesar Rp200.000.000,00, realisasi 199.800.000,00 atau 99,90%.

2) Peningkatan produksi perikanan budidaya dengan dana sebesar Rp2.272.725.000,00, realisasi Rp1.997.219.050,00 atau 87,88% dalam bentuk dua kegiatan yaitu :

- Pengembangan sistem pembenihan ikan dengan alokasi dana sebesar Rp1.024.045.000,00, realisasi Rp959.168.350,00 atau 93,66%.
- Pengembangan sistem prasarana dan sarana pembudidaya ikan dengan alokasi dana sebesar Rp1.248.680.000,00, realisasi Rp1.038.050.000,00 atau 83,13%.

3) Peningkatan daya saing produk perikanan dengan dana sebesar Rp1.356.920.000,00, realisasi Rp1.332.752.000,00 atau 98,22% dengan tiga kegiatan yaitu:

- Fasilitasi penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri dengan alokasi dana Rp100.000.000,00, realisasi 99.900.000,00 atau 99,90%.
- Fasilitasi pengembangan industri pengolahan hasil perikanan dengan alokasi dana

Rp1.061.960.000,00, realisasi Rp1.039.142.000,00 atau 97,85%.

- Fasilitas pengembangan produk hasil perikanan non konsumsi dengan alokasi dana Rp194.960.000,00, realisasi Rp193.710.000,00 atau 99,36%.

2. Sumber dan Jumlah Anggaran

Jumlah anggaran dana TP yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi TA. 2013 sebesar Rp4.034.635.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.711.832.050,00 atau 91,99%.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Masalah

Adanya penghematan anggaran APBN sehingga pembuatan kapal >30 GT sebanyak 8 unit pembuatannya dibatalkan, kecuali jasa perencanaan pembuatannya.

b. Solusi

Melanjutkan kegiatan yang tersisa dan melakukan revisi RKA-KL.

J. RSUD Raden Mattaher

1. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya

Penggunaan dana Tugas Pembantuan (TP) dari APBN Tahun 2013 oleh RSUD Raden Mattaher Jambi dilaksanakan untuk program bina upaya kesehatan yang pelaksanaannya untuk kegiatan pembangunan gedung perawatan di RSUD Raden Mattaher Jambi.

Adapun pembangunan yang dilaksanakan antara lain:

- a. Pembangunan gedung perawatan kelas III Tahap II
- b. Pembangunan gedung perawatan anak

Pelaksanaan pembangunan gedung perawatan kelas III Tahap II dimulai tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013, sedangkan pembangunan gedung perawatan anak dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan 30 Desember 2013.

2. Sumber dan Jumlah Anggaran

Jumlah anggaran dana TP yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk RSUD Raden Mattaher Jambi TA. 2013 adalah sebesar Rp30.000.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 28.181.319.100,00 atau 93,94%.

3. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan dana TP TA. 2013 di RSUD Raden Mattaher Jambi tidak menemui kendala.

K. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi

1. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya

Penggunaan dana Tugas Pembantuan (TP) dari APBN Tahun 2013 oleh Dinas koperasi dan UMKM Provinsi Jambi dilaksanakan untuk program pengembangan Pusat Layanan Usaha terpadu (PLUT) bagi KUMKM. Pagu anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp4.000.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.760.800.000,00 atau 94,02% yang dilaksanakan untuk:

- Pembangunan fisik gedung
- Upah tenaga kerja dan pengelola teknis
- Perencanaan dan pengawasan gedung
- Perjalanan dinas

2. Sumber dan Jumlah Anggaran

Jumlah anggaran dana TP dari APBN yang dialokasikan untuk Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi TA. 2013 adalah sebesar Rp4.000.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.760.800.000,00 atau 94,02%.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Masalah

Dalam pelaksanaan TP pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi TA. 2013 ini ditemui beberapa kendala/masalah, yaitu:

- Adanya perubahan personil pengelola kegiatan
- Perubahan rencana lokasi gedung PLUT KUMKM sampai 3 kali

- Proses izin pembongkaran gedung lama yang memakan waktu lama

b. Solusi

- Meminimalisir kemungkinan perubahan personil pengelola kegiatan dan percepatan proses perubahan SK apabila terjadi perubahan personil
- Penyederhanaan proses pengurusan izin

5.2 Tugas Pembantuan yang Diberikan

Pemberian Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi TA. 2013 diberikan kepada Kabupaten/Kota yaitu program peningkatan daya saing produk perikanan dengan kegiatan:

1. Sarana pemasaran sebanyak 2 paket.
2. Pembangunan IPAL sebanyak 1 paket.
3. Pengadaan sarana pengolahan sebanyak 10 paket
4. Pengadaan air bersih (Instalasi sumur bor) di Kabupaten Muara Jambi sebanyak 1 paket.
5. Instalasi listrik UPI Kabupaten Muara Jambi sebanyak 1 paket.

5.3 Dana Dekonsentrasi yang Diterima

5.3.1 Dana dan Instansi Pemberi Dana Dekonsentrasi

Dana Dekonsentrasi yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jambi melalui SKPD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp180.786.571.000,00 yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri sebesar

Rp26.474.784.000,00, Kementerian Pertanian sebesar Rp46.607.437.000,00, Kementerian Perindustrian sebesar Rp2.763.000.000,00, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp1.293.923.000,00, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp11.924.647.000,00, Kementerian Kesehatan sebesar Rp21.646.979.000,00, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp10.380.554.000,00, Kementerian Sosial sebesar Rp 17.005.748.000,00, Kementerian Kehutanan sebesar Rp4.601.904.000,00, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp8.381.190.000,00, Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp5.300.000.000,00, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp2.811.500.000,00, Kementerian Lingkungan Hidup Rp5.765.650.000,00, Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah sebesar Rp3.272.594.000,00, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebesar Rp1.521.196.000,00, Badan Koordinasi Penanaman Modal sebesar Rp500.000.000,00, Arsip Nasional Republik Indonesia sebesar Rp154.417.000,00, Kementerian Perdagangan sebesar Rp2.360.182.000,00, Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar Rp5.504.899.000,00, Kementerian Negara Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp1.584.677.000,00 dan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas sebesar 931.290.000,00. Secara keseluruhan realisasi penggunaan dana Dekonsentrasi TA. 2013 yang dikelola SKPD/ SATKER Provinsi Jambi adalah sebesar 92,13% dengan realisasi fisik mencapai 93,43%.

Tabel 5.3 Dana Dekonsentrasi Yang Dikelola SKPD Provinsi Jambi TA. 2013

No	SKPD/ Satker	KL Pemberi Dana	Total Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROV. JAMBI	Kem. DALAM NEGERI	400.000.000	399.596.800	100
2	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI	Kem. DALAM NEGERI	4.487.719.000	551.607.300	99
3	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. JAMBI	Kem. DALAM NEGERI	450.000.000	428.450.800	95
4	INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI	Kem. DALAM NEGERI	270.000.000	189.603.900	70
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAMBI	Kem. DALAM NEGERI	972.364.000	961.380.900	99
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAMBI	Kem. DALAM NEGERI	350.000.000	338.415.000	97
7	BAPPEDA PROVINSI JAMBI	Kem. DALAM NEGERI	1.295.000.000	1.128.317.579	87
8	BADAN DIKLAT PROVINSI JAMBI	Kem. DALAM NEGERI	200.000.000	193.797.900	97
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROVINSI JAMBI	Kem. DALAM NEGERI	18.049.701.000	13.954.984.924	77
10	Dinas Pertanian TP	Kem. Pertanian			
11	BADAN KETAHANAN PANGAN PROPINSI JAMBI	Kem. PERTANIAN	6.934.150.000	6.371.527.505	91,87
12	DINAS PERKEBUNAN PROPINSI JAMBI	Kem. PERTANIAN	3.870.015.000	3.547.149.285	91,66
13	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAMBI	Kem. PERTANIAN	6.459.155.000	5.987.022.878	92,7
14	SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PROPINSI JAMBI	Kem. PERTANIAN	12.170.484.000	11.280.560.000	93
16	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JAMBI	Kem. PERINDUSTRIAN	2.763.000.000	2.607.985.900	94
17	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAMBI	Kem. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.293.923.000	1.293.353.136	100
18	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI	Kem. Pendidikan dan Kebudayaan	11.924.647.000	8.019.290.150	67,24
19	DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI	Kem. KESEHATAN	21.646.979.000	20.891.409.240	96,5
20	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI	Kem. TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	10.380.554.000	10.153.251.500	97,81
21	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI	Kem. SOSIAL	14.489.781.000	13.534.874.950	93,41
22	SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PROVINSI JAMBI	Kem. KEHUTANAN	484.160.000	482.200.000	100
23	DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI	Kem. KEHUTANAN	3.070.200.000	2.808.060.050	91,5
24	UPTD BALAI INVENTARISASI DAN PEMETAAN HUTAN JAMBI	Kem. KEHUTANAN	1.047.544.000	718.306.130	69
25	BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PROVINSI JAMBI	Kem. KELAUTAN DAN PERIKANAN	639.495.000	633.340.000	99

26	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	Kem. KELAUTAN DAN PERIKANAN	7.741.695.000	7.085.145.085	91,52
27	DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. JAMBI	Kem. PEKERJAAN UMUM	5.300.000.000	5.215.571.160	98
28	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI	Kem. PARIWISATA dan ekonomi Kreatif	2.811.500.000	2.462.012.400	87,57
29	BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI JAMBI	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	5.765.650.000	3.539.924.344	61
30	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAMBI	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	3.272.594.000	2.798.418.700	86
31	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROVINSI JAMBI	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.584.677.000	1.430.427.750	90
32	BAPPEDA PROVINSI JAMBI	KEMENTERIAN NEGARA PPN / BAPPENAS	931.290.000	868.171.400	93
33	BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH JAMBI	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	1.521.196.000	386.181.900	25
34	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH (BKPMMD) PROVINSI JAMBI	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	500.000.000	488.571.000	98
35	BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH JAMBI	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	154.417.000	150.960.100	98
36	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI	Kem. PERDAGANGAN	2.360.182.000	2.235.544.082	94,72
37	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI JAMBI	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	5.504.899.000	5.348.387.987	97,16
	J U M L A H		180.786.571.000	166.558.667.862	92,13

5.3.2 Satuan Kerja Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan Dekonsentrasi terdiri dari 27 SKPD yaitu; Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Diklat Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, Bappeda, Sekretariat Daerah, Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Inspektorat, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sekretariat Bakorluh, Dinas Perindustrian dan

perdagangan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosnakertrans, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebudayaan dan pariwisata, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, dan Dinas Pemuda dan Olahraga.

5.3.3 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Beberapa kegiatan tidak dilaksanakan karena ada informasi sebelumnya untuk self-blocking (penghematan 20%). Namun ternyata penghematan tidak di proses dan diinformasikan pada triwulan terakhir, sehingga tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan dan membuat realisasi kegiatan tidak maksimal.

b. Solusi

Meningkatkan koordinasi kepada Kementerian/ Lembaga agar informasi – informasi dapat diterima secepatnya.